Bali Post

Jangan Biarkan Pro-Kontra Reklamasi Teluk Benoa Terus Bergulir

Perusakan baliho yang memuat penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa telah terjadi berulangkali setiap ada momen pejabat negara datang ke Bali ataupun ada *event* bertaraf internasional. Terakhir, baliho Desa Adat Kelan yang menjadi sasaran, dirusak orang tak dikenal ketika Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke Bali.

Oleh

I Ketut Suparta

Perusakan baliho secara diam-diam tersebut mengindikasikan bahwa kelompok pro-reklamasi juga terus bergeliat dan fenomena ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Tak lain karena jika salah kelola, perusakan secara diam-diam tersebut dapat menyulut kebencian, memancing emosi massa dan bukan tak mungkin menjadi konflik horizontal, mirip kasus Lumajang. Meski sangat berbeda substansi kasusnya, bagaimanapun kasus Lumajang menghentak kita semua, bahwa di era yang begitu luasnya menyediakan ruang dialog untuk menangani konflik, ternyata masih ada penyelesaian konflik dengan cara premanisme bahkan tergolong biadab. Seorang warga yang menolak penambangan ilegal demi membela haknya, disiksa dan dibunuh secara mengenaskan dan seorang lagi hingga mendapatkan perawatan intensif di RS meski akhirnya terselamatkan.

Memang isu reklamasi itu sangat berbeda dengan kasus Lumajang, tetapi ada satu kesamaan yaitu terbentuknya dua kubu yang berseberangan atas keberadaan proyek investasi. Kita di Bali sangat berharap jangan sampai terjadi terakumulasinya riak-riak kebencian, dan secepatnya terantisipasi persinggungan antara gerakan-gerakan yang secara terbuka menolak reklamasi dan pergerakan yang secara diam-diam berupaya memblokir langkah kelompok antireklamasi tersebut. Kita semua patut memberi perhatian serius agar kondisi pro-kontra ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Menyikapi Pro-Kontra

Ada beberapa hal yang perlu dikaji oleh penyelenggara daerah ini dalam menyikapi kondisi pro-kontra reklamasi Teluk Benoa. Pertama, tentulah kewajiban pemerintah daerah (Gubernur Bali) untuk menciptakan suasana kondusif di seluruh wilayah Bali. Dalam arti, suasana aman dan nyaman, syarat yang sangat mutlak di dalam menyangga keunggulan pariwisata sebagai basis perekonomian Bali. Karena itu jangan dibiarkan ada kelompok tandingan pro-investor yang telah memegang dukungan Gubernur terus berkembang dan bermanuver. Saatnya Pemprov Bali menghentikan bergulirnya secara masif gesekan-gesekan pro-kontra reklamasi dan harus bisa menyadarkan semua pihak bahwa tindakan-tindakan provokatif (seperti merusak baliho) hanya memperkeruh suasana yang dapat memancing emosi massa. Harus dihilangkan sama sekali kesan keberpihakan kepada satu kelompok karena cara seperti itu dapat mendorong kelompok tersebut untuk berbuat di luar batas (seperti kasus Lumajang).

Sangat disayangkan Gubernur tidak merespons secara memadai kasus perusakan-perusakan baliho yang sering terjadi. Sikap seperti itu bisa menjadi stimulan terhadap benih-benih konflik yang mulai tumbuh. Sampai saat ini belum pernah terdengar pernyataan penyelenggara daerah yang mengecam atau melarang tindakan-tindakan tak terpuji seperti itu.

Opini dari berbagai kalangan seperti akademisi, rohaniwan, LSM, pemerhati

Edisi : Senin, 2 November 2015
Hal : 6

Bali Post

sambungan ---

seperti yang kita warisi saat ini. Sudah sepatutnya pemimpin daerah Bali secara intens mengadakan pertemuan dengan para rohaniwan yang kompeten terhadap masalah spiritual terkait *taksu* Bali, lalu mendengar dan memasukkan saran-sarannya dalam mengambil keputusan.

Menurut referensi dari banyak buku tentang perjalanan leluhur Bali, beliau-beliau itu melaksanakan kegiatan perbaikan masyarakat Bali secara simultan antara spiritual dan material. Sambil mengajarkan masyarakat bagaimana cara bercocok tanam, juga tak pernah lelah mengajarkan masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dengan meningkatkan cara memuliakan Tuhan atau bakti kepada Sang Hyang Widhi.

Artinya, melakukan investasi adalah benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi jangan abai terhadap pembangunan spiritual. Jika keliru maka maksud baik untuk kepentingan rakyat justru dapat menjadi bumerang jika sampai *taksu* Bali menjadi pudar atau lenyap. DPRD Bali sebagai perwujudan rakyat Bali semestinya segera merespons fenomena yang berekembang. Tujuan investasi pasti diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, namun apa artinya jika masyarakat sendiri menolaknya dengan berbagai argumentasi? Wakil-wakil rakyat semestinya sudah cukup banyak memperoleh aspirasi dari berbagai kalangan yang menolak reklamasi, bila perlu dewan bisa bergerak lebih jauh melalui dapil-dapilnya sehingga memperoleh data yang valid.

Kedua, aparat keamanan harus meningkatkan sensitivitasnya atas indikasi gerakan provokasi belakangan ini. Diperlukan langkah profesional yaitu tegas dan tidak memihak, tak peduli apakah itu dari kelompok anti-reklamasi ataupun dari kelompok pro-reklamasi yang mendapat dukungan dari Pemprov atau pusat (perpres). Langkah preventif jauh lebih penting daripada represif, oleh karena itu jangan sampai menunggu gerakan diam-diam dari satu kelompok menjadi gerakan terbuka. Seharusnya aparat keamanan sudah mengadakan penyelidikan untuk mengungkap perusakan-perusakan baliho dan jangan memberi angin sedikit pun atas langkah kelompok yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Sekecil apa pun tindakan provokasi itu harus dicegah dan menyelidiki tindakan diam-diam secara tuntas agar tidak ada kesan pembiaran. Jangan menganggap remeh dengan hanya melihat rusaknya sebuah baliho, tetapi implikasinya sangat serius karena menyangkut kelompok antireklamasi dalam jumlah yang sangat besar.

masalah sosial, lingkungan, desa adat, dan sebagainya, sebenarnya sudah cukup untuk mengakhiri kontroversi reklamasi ini. Satu hal yang perlu diingat oleh pemimpin Bali dalam analisis SWOT terutama dari sisi ancamannya adalah pembangunan yang tidak boleh abai dari aspek spiritual. Perlu diingat kembali bahwa keberadaan Bali khususnya kesuksesannya di bidang pariwisata tak lepas dari peran leluhur Bali yang membangun Bali dengan kekuatan spiritual, sehingga Bali memiliki daya tarik (*taksu*)

Dari beberapa kali kejadian, mestinya sudah diketahui modusnya, dan ke depan bila perlu meningkatkan langkah intelijen guna menangkal tindakan-tindakan provokatif atau kalau masih ada bisa segera menangkap pelaku-pelakunya. Terlambat mengantisipasi terlebih lagi jika sengaja melakukan pembiaran maka taruhannya amat luas terhadap masalah sosial ekonomi Bali.

Ketiga, masyarakat Bali jangan mudah terprovokasi. Bali sangat berbeda dengan Lumajang, di mana kasusnya tidak berdampak jauh terhadap perekoniman daerah. Jika kasus seperti itu terjadi di Bali sudah pasti akan menjadi sorotan dunia dan akhirnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata. Masyarakat Bali sudah cukup banyak menuai pembelajaran atas terganggunya keamanan dan kenyamanan wisatawan seperti halnya bom di Legian dan Jimbaran yang berakibat matinya perekonomian Bali secara total dalam beberapa tahun. Bercermin dari situ, masyarakat Bali hendaknya tidak mudah terpecah belah hanya karena adanya investor yang menjanjikan perbaikan ekonomi. Jangan hanya karena membela kepentingan investor dan jangan karena adanya Perpres No.51 Tahun 2014 yang memberi angin segar kepada investor, lantas mengabaikan prinsip menjaga *taksu* Bali. Kelompok pro-reklamasi jangan sampai berlaku provokatif karena sikap demikian hanyalah cara-cara yang dipastikan dapat menyulut kebencian. Sebaliknya kelompok yang anti-reklamasi agar tetap di jalur yang dibenarkan secara hukum dalam melakukan protes dan demo-demo. Menyalurkan aspirasi adalah hak setiap warga negara, begitu juga mengkritisi kebijakan pemimpin daerah tak ada yang salah, tetapi harus tetap dijaga agar selalu berada di koridor yang santun sebagai ciri khas orang Bali. Hendaknya tetap menjaga emosi jangan sampai mencaci maki atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Karena, hal itu dapat menjadi masalah hukum.

Edisi : Senin, 2 November 2015

Hal : 6

Bali Post

Kisruh Dermaga Curah Cair Celukan Bawang

Pemkab Usulkan Penyempurnaan RIP, Proyek Dihentikan Sementara

PEMKAB Buleleng menyiapkan sejumlah poin yang akan diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk menyempurnakan Rencana Induk Pelabuhan (RIP-red) proyek pembangunan dermaga curah cair di sisi timur Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak. Menunggu RIP disepurnakan, pemkab tetap pada keputusan awal untuk menunda pengerjaan proyek untuk sementara hingga RIP selesai disempurnakan dan ditandatangani Menteri Perhubungan (Menhub) RI.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gede Gunawan, A.P. dan Kabag Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekkab Buleleng Ketut Suparto, Sabtu (31/10) siang kemarin. Wakil Bupati Sutjidra mengatakan, setelah mempelajari RIP yang diserahkan PT Pelindo III Surabaya Cabang Celukan Bawang beberapa bulan lalu, pemkab menemukan kalau RIP tersebut belum mengakomodir ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Buleleng. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melayangkan surat ke Kemenhub RI untuk mengusulkan agar RIP tersebut di-*review*.

Untuk memastikan proses penyempurnaan itu, Wabup Sutjidra bersama Kadishub Gunawan kemudian bertolak ke Jakarta untuk meminta penjelasan terkait proses penyempurnaan RIP. Dari koordinasi itu, muncul fakta baru kalau RIP pembangunan Dermaga Curah Cair di Buleleng Barat tersebut belum disahkan dan ini dibuktikan dengan belum ditandatanganinya dokumen penting tersebut oleh Menhub RI. "Dari awal, kami sudah menemukan ada keganjilan terhadap dokumen itu. Setelah kita tanyakan, ternyata memang belum diteken oleh Menhub," katanya.

Atas situasi ini, lanjut Wabup Sutjidra, pemkab tidak membuang kesempatan dengan mengajukan sejumlah usulan agar diakomodir oleh Kemenhub yang akan menyempurnakan RIP. Salah satu poin usulan tersebut, menyangkut kejelasan teknis dermaga curah cair yang akan dibangun. Pemkab lantas mengajukan agar dermaga curah cair itu untuk bongkar muat seperti semen surah, aspal curah, atau komoditas lain. Pemkab tegas tidak akan menyetujui kalau komoditas curah cair yang akan dibongkar pada dermaga menyangkut minyak atau gas (migas -red).

BPM/kmb38

DERMAGA - *Lokasi proyek dermaga curah cair di sisi timur Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak.*

Mengapa pemkab menolak komoditas migas, katanya, karena peruntukan dermaga itu dipastikan akan bertentangan dengan penetapan zona pada RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi Bali yang telah menetapkan bahwa Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bongkar muat barang, jasa dan penumpang (orang -red). Apalagi, Celukan Bawang belakangan ini mulai disinggahi oleh kapal pesiar, sehingga jika di pelabuhan dijadikan bongkar muat migas maka dipastikan akan berdampak terhadap aktivitas pelabuhan kapal pesiar. Untuk itu, dalam proses penyempurnaan RIP ini, pemkab berharap Kemenhub bisa menghormati regulasi yang ada di daerah karena bagaimanapun lokus proyek itu ada di Buleleng.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga wajib memberikan masukan dan saran agar pengembangan pelabuhan itu juga mengacu regulasi di daerah. "Menhub akan memangil kami. Usulan yang kita bawa, dalam menyempurnakan RIP agar dermaga curah cair itu komoditas yang bisa dibongkar bisa sama dengan yang sudah ada sekarang, yakni semen, kayu, atau barang lain. Kami tegas menolak kalau yang dibongkar migas. Jika ini sampai terjadi, akan ada pelanggaran perda RTRW yang sudah ada," tegasnya.

Wabup Sutjidra mengatakan, menunggu penyempurnaan RIP, proyek dermaga curah cair diminta agar tetap dihentikan sementara. Penghentian ini berlaku hingga RIP ini disahkan oleh Kemenhub dan ditindaklanjuti dengan kelengkapan izin-izin yang diterbitkan oleh pemeirntah daerah. Untuk itu, Wabup Sutjidra juga sudah menginstruksikan agar Pol. PP tetap memantau ke lapangan. Kalau aktivitas proyeknya masih berjalan, agar diminta melakukan pendekatan untuk menghentikan pekerjaan sementara waktu. "Mari kita sama-sama menghormti, dan karena dokumen proyek ini belum lengkap, jadi pekerjaan dihentikan sementara waktu. Kami sudah perintahkan Pol. PP untuk mengawasi jangan sampai ada aksi kucing-kucingan oleh pelaksana proyek dengan petugas Pol. PP," imbuh Wabup Sutjidra diiyakan Kadishub Gunawan. **(kmb38)**

Edisi : Minggu, 1 November 2015

Hal : 2

Bali Post

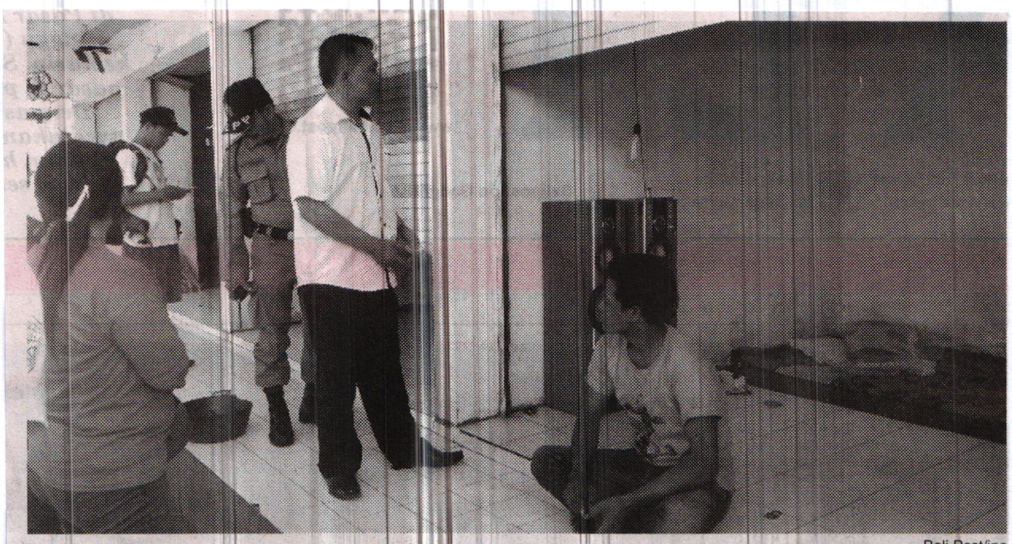

Bali Post/ina

KIOS - *Pj. Bupati Bangli saat melihat kondisi kios yang beralih fungsi menjadi tempat kos.*

Sidak Pasar Yangapi

Pj. Bupati Kaget Kios Dijadikan Kos

Bangli (Bali Post) –

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangli selama ini terkesan tutup mata dengan kondisi pasar Yangapi di Kecamatan Tembuku. Selain dibiarkan jorok, sejumlah kios yang ada di pasar tersebut juga dibiarkan beralih fungsi menjadi tempat kos. Bahkan Disperindag juga terkesan membiarkan petugas pasar setempat untuk melakukan pungutan retribusi terhadap penghuni kios tersebut.

Edisi : Senin, 2 November 2015
Hal : 8

Bali Post

Sambungan ...

Adanya kondisi tersebut terungkap saat Penjabat (Pj.) Bupati Bangli Dewa Gede Mahendra Putra melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Yangapi Minggu (1/11) kemarin. Didampingi Kadisperindag Nengah Sudibia, Kadis Tata Kota Ida Ayu Yudi Suta serta Kasatpol PP Dewa Agung Suryadarma, Mahendra Putra yang baru pertama kali mendatangi pasar tersebut mengaku sangat kaget sekaligus menyayangkan kondisi yang terjadi.

Menurutnya Mahendra Putra peruntukan pasar itu tidak jelas. "Pasar seharusnya tidak dialihfungsikan seperti ini. Kalau memang sepi harusnya dikoordinasikan, diubah peruntukannya untuk kepentingan masyarakat. Bukan dijadikan tempat kos," terangnya.

Atas kondisi itu, dirinya pun meminta Kadisperindag Nengah Sudibya untuk segera mengecek kejelasan status aset pasar yang berdiri di tanah Pemprov Bali itu.

Jika sudah jelas barulah akan dicarikan terobosan sehingga peruntukan pasar tersebut menjadi jelas. "Sayang sekali bangunan besar kondisinya seperti ini," ujarnya. Sementara itu salah seorang warga yang tinggal di kios Pasar Yangapi I Nyoman Sulastra saat ditemui Pj. Bupati mengaku dirinya bersama beberapa anggota keluarganya yang lain sudah tinggal di Pasar Yangapi sejak hampir dua tahun terakhir.

Dirinya mengaku menyewa tiga kios yang kesemuanya dijadikan rumah tinggal. Selain membayar sewa tahunan kepada pemilik kios, pria asal Desa Kutuh Kintamani ini juga mengaku membayar retribusi setiap pasaran senilai Rp 4.000 per satu unit kios. Hal yang sama juga diakui warga lainnya I Wayan Gading. Didampingi istrinya, Gading mengaku selalu dipunguti retribusi setiap hari pasaran yang jatuh tiga hari sekali.

Karena dirinya menyewa kios sebanyak 3 unit, maka total retribusi yang harus dibayarkannya Rp 12 ribu. "Yang mungut petugas pasarnya," terangnya. Dari tiga unit kios yang disewanya, hanya satu yang digunakannya untuk berjualan. Dua sisanya digunakan sebagai tempat tinggal.

Mendengar penuturan dua warga tersebut Kadisperindag Nengah Sudibia bersama Kepala Pasar Ngakan Kawiarta tak bisa berkutik. Pasalnya sejak awal sidak, Sudibia mengaku kepada Pj. Bupati bahwa kios tersebut disewakan oleh pemiliknya. Sehingga saat dialihfungsikan menjadi tempat kos sama sekali tidak ada kaitan dengan pihaknya. Kendati jelas-jelas warga yang menempati kios tersebut mengaku dipunguti retribusi oleh petugas pasar, namun pejabat asal Penglipuran ini tetap mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pungutan retribusi terhadap kios yang dijadikan tempat kos.

"Retribusi hanya dipungut pada kios yang memang berjualan. Untuk kios yang dijadikan tempat tinggal tidak kami pungut retribusi," tandasnya. Sementara itu, Kepala Pasar Yangapi Ngakan Kawiarta menyebutkan dari 135 kios yang ada, sekitar 15 dialihfungsikan oleh warga menjadi tempat tinggal. Dirinya mengaku sudah sering mengingatkan warga yang tinggal di sana untuk tidak memanfaatkan kios tersebut menjadi tempat kos. "Tapi tetap saja mereka tinggal di sana," imbuhya. **(kmb40)**

2

Edisi : Senin, 2 November 2015

Hal : 8